



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/177/HK/2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Gubernur Bali, Cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali;
6. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 177 /HK/2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

2024



KATA PENGANTAR



KETUT LIHADNYANA

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun ke-1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Secara substansial LKjIP Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2023 merupakan laporan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP ini sudah menyesuaikan dengan pohon kinerja terdiri dari 8 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama.



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 20 Maret 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sejarah Kabupaten Buleleng.....	I-5
1.5 Gambaran Umum Daerah.....	I-9
1.6 Isu Strategis.....	I-56
1.7 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.....	I-63
1.8 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja.....	I-66
1.9 Sistematika Penyajian.....	I-67
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II-1
2.1. RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026.....	II-1
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025	II-3
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	II-5
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II-9



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

2.1.4	Tema Fokus Pembangunan Daerah dan	
	Prioritas.....	II-19
2.2.	Indikator Kinerja Utama.....	II-20
2.3.	Perjanjian Kinerja.....	II-23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1	Tahapan Evaluasi dan Analisis.....	III-1
3.2	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3	Capaian Kinerja.....	III-4
3.4	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-5
3.5	Realisasi Anggaran.....	III-104
BAB IV	PENUTUP.....	IV-1
4.1	Simpulan.....	IV-1
4.2	Langkah Perbaikan kedepan.....	IV-7
LAMP.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
LAMP.2	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
LAMP.3	RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
LAMP.4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	
LAMP.5	PRESTASI YANG DICAPAI	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng	I-10
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Buleleng Tahun 2022	I-11
Tabel 1.3	Tinggi Wilayah Kabupaten Buleleng dari Permukaan Laut Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	I-12
Tabel 1.4	Rata-rata Keadaan Meteorologi Menurut Stasiun	I-16
Tabel 1.5	Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng	I-27
Tabel 1.6	Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng	I-29
Tabel 1.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-32
Tabel 1.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-33
Tabel 1.9	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023 (dalam ribuan jiwa)	I-34
Tabel 1.10	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022	I-34
Tabel 1.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Periode Tahun 2018-2022	I-36
Tabel 1.12	Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2018-2022	I-37
Tabel 1.13	Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2018-2022	I-39
Tabel 1.14	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Harga	I-40



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

	Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	
Tabel 1.15	Garis Kemiskinan Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-44
Tabel 1.16	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-44
Tabel 1.17	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-45
Tabel 1.18	Kondisi Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-46
Tabel 1.19	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-49
Tabel 1.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-53
Tabel 1.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-53
Tabel 1.22	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-62
Tabel 2.1	Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	II-10
Tabel 2.2	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	II-14
Tabel 2.3	Tema Fokus Pembangunan Tahun 2023-2026	II-19
Tabel 2.4	Jabaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026	II-19
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023	II-21



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023	II-24
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.2	Target, Realisasi, dan Capaian Anggaran untuk Mencapai Target IKU dan Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Penjabat Bupati Buleleng Tahun 2023	III-104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng	I-9
Gambar 1.2	Persentase Penggunaan Lahan Budidaya dan Lahan Lindung Kabupaten Buleleng	I-17
Gambar 1.3	Persentase Penggunaan Lahan Budidaya di Kabupaten Buleleng	I-18
Gambar 1.4	Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng	I-28
Gambar 1.5	Gambaran Perkembangan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 (jiwa)	I-31
Gambar 1.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 (jiwa)	I-31
Gambar 1.7	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-38
Gambar 1.8	Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-43
Gambar 1.9	IPM Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-47
Gambar 1.10	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2018-2022	I-48
Gambar 1.11	Perkembangan IPG Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	I-51
Gambar 1.12	Penduduk Usia Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	I-52
Gambar 1.13	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	I-67



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Gambar 2.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	II-8
------------	---	------



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki Akuntabilitas Kinerja merupakan aspek penting yang perlu diimplementasikan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan handal. Perjanjian Kinerja Penjabat Bupati Buleleng Tahun 2023 untuk mewujudkan Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, memiliki 8 (delapan) Sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis atas hasil pengukuran kinerja, maka dapat dilaporkan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target 2023

Capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target diberi predikat **Melampaui Target**, bila realisasi lebih dari target; **Sesuai Target**, bila realisasi sama dengan target; dan **Belum Mencapai Target**, bila realisasi kurang dari target. Dalam perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023 ada dua simpulan yang didapatkan yaitu capaian 10 (sepuluh) IKU dan Capaian 8 (delapan) Sasaran.



1.1 Capaian IKU

Berdasarkan predikat atas capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, maka predikat 10 Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut.

No	Predikat Capaian IKU	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Melampaui Target	3	30
2	Sesuai Target	3	30
3	Belum Mencapai Target	4	40
	Jumlah	10	100,00

Indikator Kinerja Utama dengan predikat capaian **Melampaui Target**, **Sesuai Target**, dan **Belum Mencapai Target**, digambarkan berikut.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Predikat
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,28	Melampaui Target
2	PDRB	98,45	Belum Mencapai Target
3	PDRB Perkapita	95,39	Belum Mencapai Target
4	Indeks infrastruktur wilayah	100	Sesuai Target
5	Persentase penduduk miskin	86,40	Belum Mencapai Target
6	Persentase PMKS tertangani	349,13	Melampaui Target
7	Persentase penanganan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)	100	Sesuai Target



No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Predikat
1	2	3	4
8	Persentase pelestarian adat budaya	100	Sesuai Target
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	99,93	Belum Mencapai Target
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	110,28	Melampaui Target

1.2 Capaian Sasaran

Berdasarkan pemberian predikat atas nilai rata-rata capaian Sasaran tahun 2023, maka predikat Sasaran yang berhasil diraih tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Predikat Capaian Sasaran	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Melampaui Target	3	37,5
2	Sesuai Target	3	37,5
3	Belum Mencapai Target	2	25
Jumlah		8	100,00

Sasaran dengan predikat capaian **Melampaui Target**, **Sesuai Target**, dan **Belum Mencapai Target**, digambarkan sebagai berikut.

No	Sasaran	Capaian %	Predikat
1	2	3	4
1	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	102,28	Melampaui Target
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	96,92	Belum Mencapai Target



No	Sasaran	Capaian %	Predikat
1	2	3	4
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur	100	Sesuai Target
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	217,77	Melampaui Target
5	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	100	Sesuai Target
6	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	100	Sesuai Target
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99,93	Belum Mencapai Target
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	110,28	Melampaui Target

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Kondisi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi IKU Tahun 2023 dengan kondisi tahun 2022 dan Tahun 2021 dari 10 (sepuluh) IKU 80% lebih baik dari kondisi tahun 2022 dan tahun 2021 dan 20% sama dengan kondisi tahun 2022 dan tahun 2021.

Perbandingan realisasi Sasaran (rerata IKU Sasaran) tahun 2023 dari 8 (delapan) Sasaran, 6 (enam) Sasaran (75%) lebih baik dari kondisi tahun 2022 dan tahun 2021, dan 2 (dua) Sasaran (25%) sama dengan kondisi tahun 2022 dan tahun 2021.



3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2026, akhir RPD

Sesungguhnya realisasi IKU maupun Sasaran tahun 2023 masih wajar belum mencapai target tahun 2026, pada akhir RPD, karena tahun 2023 merupakan tahun pertama RPD. Namun dari 10 (sepuluh) IKU, 4 (empat) (40%) IKU sudah Melampaui Target tahun 2026. 1 (Satu) IKU (10%) sudah Sesuai Target tahun 2026, dan 5 (lima) IKU (50%) Belum Mencapai Target Tahun 2026.

Dari 8 (delapan) Sasaran, 3 (tiga) Sasaran (37,5%) sudah Melampaui Target tahun 2026, 1 (satu) Sasaran (12,5%) sudah Sesuai Target tahun 2026, dan 4 (empat) Sasaran (50%) Belum Mencapai Target tahun 2026.

4. Perbandingan realisasi 2023 dengan kondisi Provinsi Bali dan Nasional

Tidak semua realisasi IKU dan realisasi Sasaran dapat dibandingkan dengan kondisi Provinsi Bali dan kondisi Nasional, karena ketiadaan data pembanding sebagai akibat perbedaan IKU dan Sasaran. Namun demikian ada realisasi IKU dan Realisasi Sasaran yang bisa dibandingkan, sebagai berikut.

4.1 IPM

Realisasi IPM Kabupaten Buleleng tahun 2023 lebih rendah dari IPM Provinsi Bali tahun 2023 yang mencapai 77,10. Posisi IPM Kabupaten Buleleng tahun 2023 berada pada nomor 5 (lima) diantara 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali, di Bawah IPM Kabupaten Tabanan dan masih di atas IPM Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Jika dibandingkan dengan IPM secara Nasional (Indonesia) tahun 2023 pada posisi 74,39, maka IPM Kabupaten Buleleng lebih tinggi dari IPM secara Nasional.



4.2 PDRB per Kapita

PDRB tingkat Kabupaten tentu tidak setara dibandingkan dengan PDRB tingkat Provinsi, apalagi dengan PDRB Nasional, karena besaran wilayah, jumlah penduduk, dan besaran ekonomi memang berbeda. Namun PDRB (pendapatan) per kapita dapat dibandingkan.

PDRB per kapita Kabupaten Buleleng tahun 2023 lebih kecil dari PDRB per kapita Provinsi Bali. Dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali PDRB per kapita Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke tujuh, masih di atas PDRB per kapita Kabupaten Karangasem dan Bangli.

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Nasional (Indonesia), PDRB per kapita Kabupaten Buleleng lebih kecil dari PDRB per kapita Nasional.

4.3 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng 5,85% lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bali. Tahun 2023 persentase penduduk miskin Provinsi Bali 4,26%.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng lebih rendah dari persentase penduduk miskin secara nasional. Maret tahun 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia 12,22%.

4.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2023 adalah 72,54. Hal ini berarti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah 70 lebih rendah dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional.

5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusinya

Peningkatan kinerja atau keberhasilan melampaui target dan sesuai target kinerja secara umum disebabkan oleh terlaksananya program dan kegiatan secara optimal karena adanya komitmen pimpinan yang terus-



menerus mendorong pelaksana program dan kegiatan untuk mewujudkan perjanjian kinerja yang disepakati.

Penurunan kinerja atau belum berhasilnya mencapai target secara umum disebabkan oleh tidak terlaksananya secara optimal program dan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan perbandingan capaian (%) penggunaan anggaran dengan capaian (%) target kinerja. Bila capaian (%) target kinerja lebih tinggi dari capaian (%) penggunaan anggaran berarti ada efisiensi penggunaan anggaran. Jika capaian (%) target kinerja lebih rendah dari capaian (%) penggunaan anggaran berarti ada inefisiensi penggunaan anggaran.

Dari 10 (sepuluh) IKU dan 8 (delapan) Sasaran, semuanya ada efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023. Hal ini berarti realisasi IKU dan Sasaran yang belum mencapai target, capaian penggunaan anggarannya juga lebih rendah dari capaian IKU dan Sasaran.

7. Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung capaian target 10 (sepuluh) IKU dan 8 (delapan) Sasaran dilaksanakan 74 program dengan anggarannya sesuai perjanjian kinerja, dan ada efisiensi penggunaan anggaran pada semua program.

Pelaksanaan program-program itu dengan efisiensi penggunaan anggarannya, didukung oleh pelaksanaan kegiatan di tingkat eselon 3 (tiga).

8. Langkah Perbaikan Kedepan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.



- 2) Memantapkan penggunaan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Semua Perangkat Daerah membuat Rencana Aksi dan berupaya keras mencapai Kinerja yang diperjanjikan.
- 4) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) diwajibkan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula seluruh Perangkat Daerah menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerjanya.
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
- 6) Komitmen pimpinan untuk terus-menerus memantau dan mendorong penanggungjawab capaian IKU dan Sasaran untuk bekerja keras mewujudkan perjanjian kinerja yang disepakati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, diharapkan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Singaraja, 20 Maret 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA